BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Setiap kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, dan prospek perekonomian DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016. Bab ini juga membahas perkiraaan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2016.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian DKI Jakarta tahun 2016 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2016 yaitu (1) mendukung untuk peningkatan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan; (2) melakukan komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar; (3) meningkatkan koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk mencapai efektivitas kebijakan dan; (4) melakukan penguatan kebijakan struktural untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Termasuk kebijakan pengelolaan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok.

Selain itu, kebijakan perekonomian DKI Jakarta juga diarahkan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkesinambungan, berkelanjutan, berkeadilan dan inklusif dengan mengedepankan upaya pembangunan infrastruktur, penurunan jumlah penduduk miskin, pengelolaan inflasi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan investasi.

Kerangka ekonomi daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar tahun 2016. Kerangka ekonomi makro juga memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan dan IPM.

Kebijakan ekonomi daerah adalah Perekonomian DKI Jakarta bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi dasar dan perkiraan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2016 memperhitungkan hasil

analisis terhadap kinerja perekonomian global dan nasional tahun 2014 dan 2015.

3.1.1. Proyeksi Perekonomian Global

Kinerja perekonomian global tahun 2015 dan 2016 diperkirakan terus membaik sehingga diharapkan memberi dampak positif bagi kinerja perekonomian nasional. Perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,9 persen pada tahun 2016, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1. Hampir sebagian besar perekonomian negara maju yang menjadi mitra dagang Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Kondisi ini akan memberikan peluang bagi peningkatan perdagangan dunia, permintaan ekspor dan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2015 dan 2016.

Tabel 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2015 dan 2016

Kawasan/Negara	2013	2014	2015*	2016*
Dunia	3,2	3,0	3,6	3,9
Negara Maju	1,4	1,8	3,1	3,1
AS	2,2	2,4	3,1	3,1
Kawasan Eropa	-0,5	0,9	1,5	1,6
Jepang	1,6	-0,1	1,0	1,2
Korea Selatan	3,0	3,3	3,3	3,5
Negara Asia	7,0	6,8	6,6	6,4
Tiongkok	7,8	7,4	6,8	6,3
India	6,9	7,2	7,5	7,5
ASEAN-5	5,2	4,9	5,4	5,4
Indonesia	5,6	5,0	5,2	5,5

Sumber: IMF *World Economic Outlook*, April 2015.
*: Prakiraan

Pada Tabel 3.1 di atas ditunjukkan proyeksi perekonomian global. Perekonomian global dipicu Perekonomian AS tumbuh solid, dimana didukung oleh meningkatnya sisi konsumsi dan membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Sedangkan di sisi lain juga tergambarkan Pertumbuhan ekonomi Eropa yang mengarah pada kondisi sedikit membaik dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih dalam tren melambat pada kisaran sekitar 6,9% - 7%. Sementara pertumbuhan ekonomi Jepang yang diproyeksi masih relatif stagnan pada kisaran sekitar 1%. Selanjutnya gambaran proyeksi perekenomian global kedepan terlihat pada Gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1 Pergerakan Proyeksi Perekonomian Global

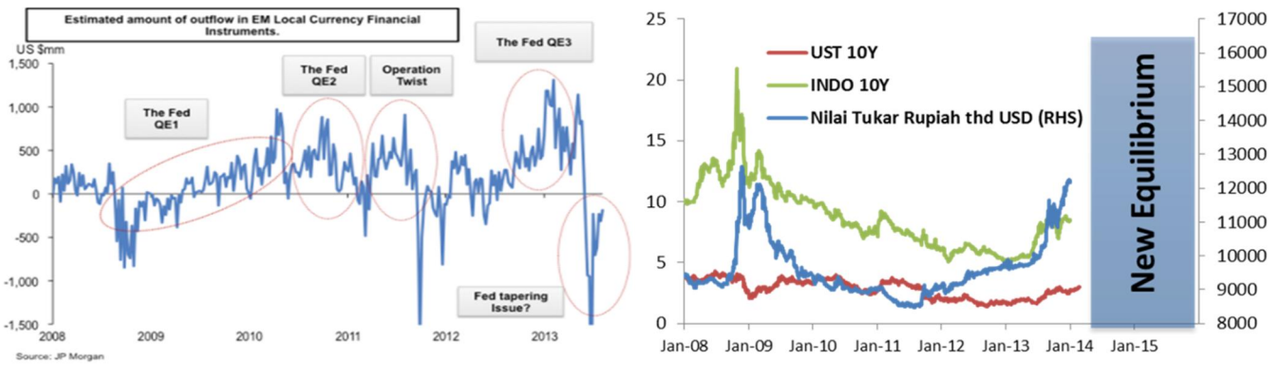

Sumber: JP Morgan diolah oleh Badan Kebijakan Fiskal, 2015

Dari sisi harga komoditas global Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1, menunjukkan tren pelemahan seiring dengan menurunnya permintaan global seiring dengan Commodity Boom yang telah berakhir. Pengurangan secara bertahap stimulus moneter di AS telah berdampak pada nilai tukar dan imbal hasil surat utang. Kondisi perekonomian global saat ini telah amat berbeda dengan kondisi 4 tahun terakhir dimana pada periode tersebut dunia menikmati stimulus moneter dan harga komoditas yang tinggi dan saat ini ekonomi global sedang bergerak menuju "*New Equilibrium*".

3.1.2. Proyeksi Perekonomian Nasional

Hasil perkiraan *International Monetary Fund* (IMF), perekonomian nasional pada tahun 2015 akan tumbuh 5,2 persen pada tahun 2015 dan 5,5 persen pada tahun 2016. Sementara, Pemerintah Pusat menetapkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang lebih optimis pada kisaran 5,4-5,8 persen. Peningkatan pertumbuhan tersebut diharapkan dari perbaikan kinerja investasi sejalan dengan realisasi berbagai proyek infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, serta konsumsi yang tetap kuat. Sementara itu, penerimaan ekspor juga diperkirakan mengalami perbaikan secara bertahap sehingga defisit neraca berjalan menjadi sedikit lebih baik.

Tabel 3.2 Asumsi Ekonomi Makro 2016

Uraian	APBN 2014	APBNP 2015	KEM dan KF 2016
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,70	5,8-6,2
2. Inflasi (%)	8,40	5,00	4,0±1,0
3. Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan (%)	5,80	6,20	4,0-6,0
4. Nilai Tukar (Rp/USD1)	11.878,0	12.500,0	12.800,0-13.200,0
5. Persentase penduduk miskin (%)	10,96	10,30	9,00-10,00
6. Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,94	5,60	5,20-5,50
7. Indeks Gini	0,413	0,413	0,39
8. Indeks Pembangunan Manusia			70,1

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2016
KEM : Kebijakan Ekonomi Makro
KF : Kebijakan Fiskal

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Tahun 2016, Pemerintah Pusat telah menyusun asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016.

3.1.3. Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2015

Nilai PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku telah meningkat menjadi dari Rp.1.103,69 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp.1.547,03 Triliun pada tahun 2013 dan Rp.1.761,41 Triliun pada tahun 2014. Peningkatan nilai PDRB selain disebabkan oleh berkembangnya kegiatan ekonomi daerah juga disebabkan oleh perubahan tahun dasar perhitungan dari tahun 2000 menjadi tahun 2010.

Nilai PDRB DKI Jakarta tercatat tinggi dibanding provinsi lainnya. Sumbangan PDRB DKI Jakarta terhadap PDB Nasional menunjukkan lebih dari 17 persen. Dengan kata lain, DKI Jakarta mempunyai peran sangat penting sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional.

Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (Rp.Miliar)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	847	919	968	1.618	1.711
2. Pertambangan dan Penggalian	3.701	4.934	5.182	4.288	4.541
3. Industri Pengolahan	135.615	153.621	172.335	209.779	239.597
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	8.880	9.584	10.234	5.749	6.285
5. Bangunan	98.425	112.056	126.274	210.651	234.184
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	178.358	204.474	228.043	340.870	397.029
7. Pengangkutan dan Komunikasi	87.688	101.102	114.229	160.071	183.233
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	239.222	271.632	305.618	367.616	413.594
9. Jasa-Jasa	109.254	124.211	140.811	246.396	281.233
PDRB	861.992	982.534	1.103.693	1.547.037	1.761.407

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Perkembangan nilai PDRB menurut lapangan usaha menggambarkan sektor basis atau sektor utama yang menggerakkan kegiatan ekonomi di DKI Jakarta. Hasil analisis dengan menggunakan data BPS menunjukkan perkembangan empat sektor utama dengan nilai PDRB tertinggi, yaitu: keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta industri pengolahan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa *(Service City)* tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Sekitar 72,69 persen PDRB Jakarta berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan), sebesar 26,83 persen berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya sebesar 0,48 persen dari sektor primer

Selanjutnya apabila dirinci lebih dalam, PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4, diketahui bahwa struktur ekonomi DKI Jakarta menurut lapangan usaha pada tahun 2014 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; konstruksi; serta jasa keuangan dan asuransi. Sumbangan nilai tambah dari kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB pada tahun 2014 tercatat sebesar 17,30 persen atau meningkat sebesar 0,42 persen dibanding tahun 2013. Sektor lain yang mempunyai peran cukup besar adalah industri pengolahan dengan sumbangan sebesar 13,60 persen atau meningkat sebesar 0,04 persen dibanding tahun 2013. Selain itu, sektor lain yang juga ikut mendukung penciptaan nilai tambah adalah kegiatan konstruksi dengan sumbangan sebesar 13,30 persen; dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,16 persen.

Sumbangan sektor sekunder yang terdiri dari kegiatan industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; dan pengadaan air dan pengelolaan sampah tercatat sekitar 27,26 persen, dan kegiatan konstruksi sebesar 11,44 persen. Sementara sumbangan sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan pertambangan dan penggalian hanya sebesar 0,36 persen.

Tabel 3.4 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
(Miliar Rupiah)

No	lapangan usaha	2014	Distribusi 2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.711	0,10%
2	Pertambangan dan Penggalian	4.541	0,26%
3	Industri Pengolahan	239.597	13,60%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.580	0,32%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	705	0,04%
6	Konstruksi	234.184	13,30%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	304.655	17,30%
8	Transportasi dan Pergudangan	54.848	3,11%
9	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	92.374	5,24%
10	Informasi dan Komunikasi	128.385	7,29%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	178.998	10,16%
12	Real Estate	111.672	6,34%
13	Jasa Perusahaan	122.924	6,98%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	98.085	5,57%

No	lapangan usaha	2014	Distribusi 2014
15	Jasa Pendidikan	92.477	5,25%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	28.887	1,64%
17	jasa lainnya	61.783	3,51%
	total	**1.761.406**	**100%**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Struktur ekonomi tersebut menegaskan bahwa DKI Jakarta menjadi daerah yang mengandalkan pada jasa sebagai kegiatan ekonomi utama. Oleh sebab itu, pada tahun 2016 pembangunan perlu diarahkan pada penyediaan tempat usaha yang layak dan menguntungkan bagi pelaku usaha; penciptaan ketertiban yang menjamin kenyamanan bagi pelaku usaha; dan perlindungan dan penjaminan bagi pelaku usaha.

Selain dari sisi produksi, Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2014 terbesar ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 60,72 persen, menurun bila dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 61,01 persen. Kontribusi terbesar kedua ada pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 41,16 persen, komponen ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 44,18 persen. Sedangkan kontribusi terkecil ada pada komponen perubahan inventori yang sebesar 0,20 persen selama tahun 2014. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2014

No	Komponen	2014	Distribusi 2014
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.069.514	60,72%
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	35.404	2,01%
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	220.735	12,53%
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	725.064	41,16%
5	Perubahan Inventori	3.489	0,20%
6	Ekspor Barang dan Jasa	298.308	16,94%
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.164.992	66,14%
8	Net Ekspor Antar Daerah	573.886	32,58%
	PDRB	**1.761.408**	**100%**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Dengan memperhatikan data PDRB menurut pengeluaran, data BPS menunjukkan bahwa struktur ekonomi DKI Jakarta didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga mempunyai nilai tertinggi diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto; dan Net Ekspor antar daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6. Tantangan yang harus diatasi pada tahun 2012 adalah penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil bahan kebutuhan pokok untuk menjamin pasokan secara tepat waktu dengan mutu yang terjaga, pengurangan kemacetan untuk memperlancar distribusi bahan pokok, dan penciptaan lingkungan usaha yang tertib dan nyaman.

Tabel 3.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014 (Rp.Miliar)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	488.283	560.065	627.777	943.845	1.069.514
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT				26.805	35.404
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	80.888	97.222	106.135	211.845	220.735
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	309.491	375.732	426.812	683.499	725.064
5. Perubahan Inventori				3.685	3.489
6. Ekspor Barang dan Jasa	452.123	540.935	620.132	272.126	298.308
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	468.794	591.421	677.162	964.203	1.164.992
8. Net Ekspor Antar Daerah				369.436	573.885
PDRB	861.992	982.534	1.103.693	1.547.038	1.761.407

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Dengan memperhatikan data PDRB menurut daerah, kegiatan ekonomi DKI Jakarta cenderung tersebar merata di kota terutama di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7 Dampak pemusatan kegiatan ekonomi tersebut menyebabkan penumpukan kegiatan dan munculnya kemacetan. Di sisi lain, sumbangan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu relatif kecil.

Tabel 3.7 Struktur Ekonomi Menurut Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2010-2014 (Persen)

Kota/Kabupaten Administrasi	2010	2011	2012	2013
1. Kepulauan Seribu	0,47	0,54	0,51	0,48
2. Jakarta Selatan	22,04	2,20	22,14	21,92
3. Jakarta Timur	17,07	16,88	16,89	16,87
4. Jakarta Pusat	26,39	2,64	26,51	26,77
5. Jakarta Barat	1,49	14,79	14,77	14,81
6. Jakarta Utara	18,71	18,76	18,81	18,79
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah mengembangkan kegiatan ekonomi baru di Kepulauan Seribu dan menjaga momentum pertumbuhan di kota dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung termasuk tempat usaha yang layak bagi pengusaha kecil dan menengah, mengatasi kemacetan, mencegah banjir dan menciptakan ketertiban dan keamanan di pusat-pusat bisnis.

3.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menandai kecepatan perputaran kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah dibanding tahun sebelumnya. Data BPS menunjukkan bahwa realisasi laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar 6,11 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Laju pertumbuhan ekonomi dalam periode 2008 - 2014 selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,95 persen atau melambat dibanding tahun 2013 sebesar 6,11 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2014 sebagaimana terlihat pada gambar 3.2 disebabkan oleh stagnasi perekonomian global yang berdampak pada menurunnya permintaan ekspor hasil indiustri yang diproduksi perusahan di DKI Jakarta.

Gambar 3.2 Preview Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 - 2014

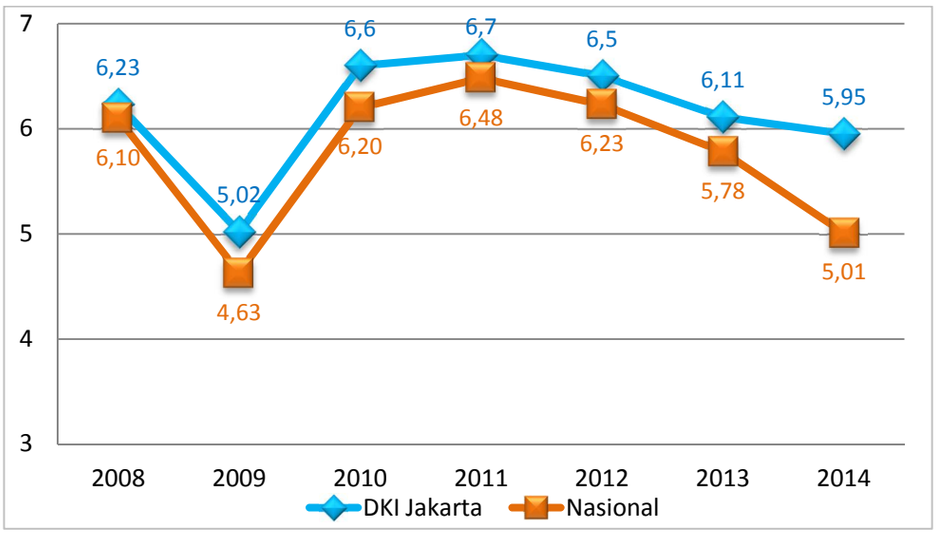

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2015

Sumber utama pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta adalah sektor jasa, yaitu pengangkutan dan komunikasi; jasa-jasa; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebagai terlihat pada Tabel 3.8. Dengan menggunakan tahun dasar 2010, sumber pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2014 adalah sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 13,72 persen; sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,08 persen; dan sektor jasa perusahaan sebesar 8,95 persen. Tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2016 adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan mendorong pengembangan dan pemberian kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat menyerap tenaga lebih banyak, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan EKonomi DKI Jakarta Tahun 2010-2014 (persen)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	0,84	0,77	0,82	1,64	0,12
2. Pertambangan dan Penggalian	1,47	4,35	-0,89	-0,84	-1,61
3. Industri Pengolahan	3,61	2,54	2,41	2,43	3,59
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4,33	4,65	4,44	2,85	0,66
5. Bangunan	7,08	7,22	6,83	5,74	5,43
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7,27	13,80	7,21	6,42	5,51
7. Pengangkutan dan Komunikasi	14,73	5,28	11,79	10,84	10,58
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,24	7,05	5,35	5,17	4,83
9. Jasa-Jasa	6,58	6,73	7,58	7,46	7,50
PDRB	6,50	6,73	6,53	6,11	5,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian berdasarkan harga berlaku, Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9 di bawah ini, Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,72 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 11,08 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 8,95 persen.

Tabel 3.9 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

lapangan usaha	2014	Pertumbuhan (persen)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.711	0,73
Pertambangan dan Penggalian	4.541	-0,86
Industri Pengolahan	239.597	5,53
Pengadaan Listrik dan Gas	5.580	1,76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	705	3,75
Konstruksi	234.184	4,68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	304.655	4,95
Transportasi dan Pergudangan	54.848	13,72
Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	92.374	5,80
Informasi dan Komunikasi	128.385	11,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	178.998	4,54
Real Estate	111.672	4,96
Jasa Perusahaan	122.924	8,95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	98.085	1,21
Jasa Pendidikan	92.477	3,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	28.887	6,85
jasa lainnya	61.783	8,47
total	**1.761.406**	**5,95**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas pula, berberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar -0,86 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,21 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,76 persen.

Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan Usaha 2014

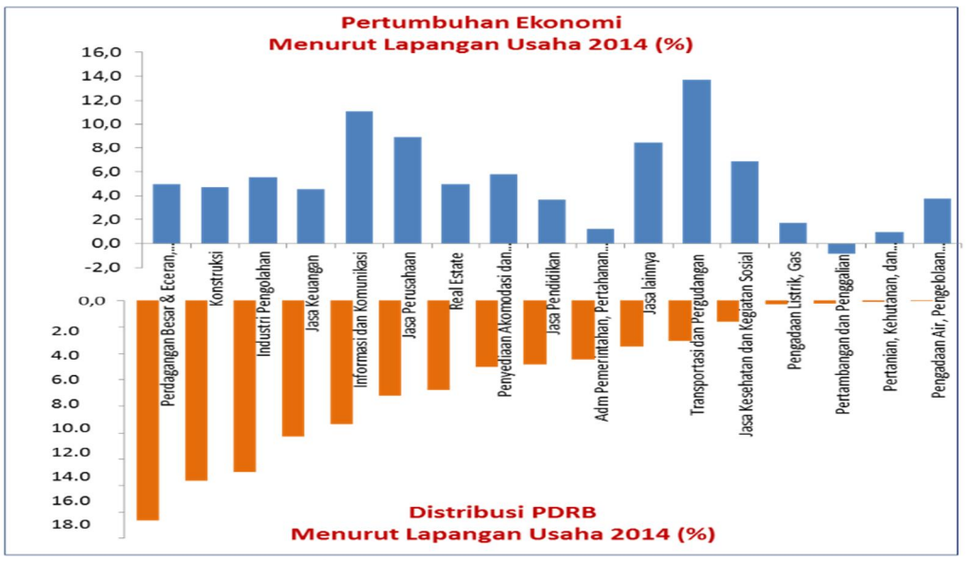

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2015

Berdasarkan Gambar di atas, percepatan pengembangan kegiatan ekonomi perlu dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengalami stagnasi kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, pada tahun 2016 program dan kegiatan harus diarahkan pada pengembangan kegiatan ekonomi di Kepulauan Seribu sebagaimana terlihat pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2010-2014 (Rp.Miliar)

Kota/Kabupaten Administrasi	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1. Kepulauan Seribu	2,03	4,52	0,10	0,24	1,72
2. Jakarta Selatan	6,55	6,97	6,69	6,24	6,61
3. Jakarta Timur	6,06	6,28	6,50	6,08	6,23
4. Jakarta Pusat	6,62	6,94	6,76	6,44	6,69
5. Jakarta Barat	6,07	6,25	6,39	6,24	6,24
6. Jakarta Utara	6,02	6,36	6,04	5,80	6,06
DKI Jakarta	6,50	6,73	6,53	6,11	6,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Perekonomian DKI Jakarta setelah mengalami perlambatan pada tahun 2014, pada Tahun 2015 diproyeksikan mampu lebih baik. Proyeksi ini diperkuat oleh adanya dukungan potensi baik dari sektor *tradable* (jasa-jasa) maupun sektor manufaktur pendukung ekspor. Pertumbuhan perekonomian Jakarta pada tahun 2015, ditopang oleh prospek membaiknya investasi serta menguatnya konsumsi rumah

tangga. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada akhir tahun 2015 diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 5,9% - 6,3%.

3.1.5. Inflasi Jakarta

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2014 adalah sebesar 8,95%, lebih tinggi dari inflasi tahun 2013 yaitu 8,0%. Lebih lanjut perkembangan Inflasi pada tahun 2012 hingga 2014 ditunjukkan pada gambar 3.4 Berikut ini:

Gambar 3.4 Preview perkembangan inflasi DKI Jakarta dan Nasional tahun 2012 – 2014

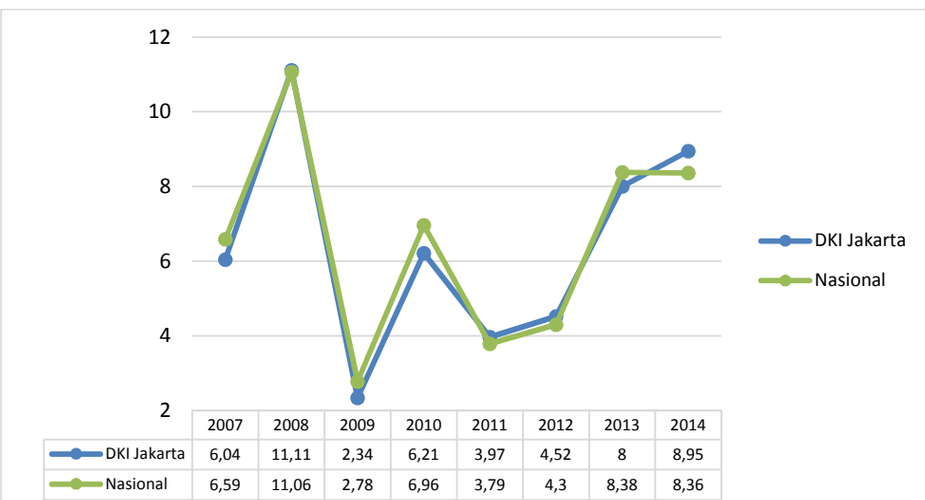

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DKI Jakarta	6,04	11,11	2,34	6,21	3,97	4,52	8	8,95
Nasional	6,59	11,06	2,78	6,96	3,79	4,3	8,38	8,36

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2015

Berdasarkan hasil kajian ekonomi dan keuangan regional (KER) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dalam empat tahun terakhir (kecuali tahun 2013) inflasi Jakarta cenderung lebih tinggi dari inflasi nasional. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh posisi Jakarta sebagai daerah defisit pangan dan relatif kuatnya permintaan masyarakat urban, khususnya kelas menengah.

Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 merupakan salah satu kebijakan dari rangkaian kebijakan reformasi subsidi energi yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2014 yang memberikan dampak cukup signifikan bagi perkembangan inflasi. Dengan adanya kebijakan ini tekanan inflasi di Jakarta melonjak pada akhir tahun 2014. Dampak langsung dari kenaikan harga BBM pada tahun 2014 terhadap komoditas bensin sebesar 30,8%, lebih rendah daripada tahun

2013 sebesar 44,4%. Namun, dampak tidak langsung yang ditimbulkan lebih besar pada tahun 2014 akibat melonjaknya ekspektasi masyarakat sehubungan dengan sejumlah penerapan beberapa kebijakan energi pada tahun 2014 maupun yang akan diterapkan pada tahun 2015. Diketahui pula bahwa inflasi DKI Jakarta tahun 2014 ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 8,38. Selanjutnya, imbas dari tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi terlihat dari penurunan Indeks Tendensi Konsumen pada triwulan IV 2014 berikut:

Tabel 3.11 Indeks Tendensi Konsumen, 2014

	Variabel Pembentuk	Triwulan I-2014	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Rumah Tangga kini	117,41	118,98	122,05	108,38
2	Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi makanan	117,54	118,07	113,42	106,16
3	Tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, rekreasi)	117,95	114,58	117,48	118,39
	Indeks Tendensi Konsumen	**117,56**	**117,79**	**118,75**	**109,93**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2015, inflasi nasional pada Nota Keuangan APBN 2015 diproyeksikan mencapai 4,4% atau berada pada rentang kisaran 4,0±1 dimana diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional dan domestik disamping faktor iklim dan bencana alam masih tetap menjadi salah satu sumber potensi peningkatan laju inflasi ke depan. Penentuan tersebut juga didasari dengan pertimbangan resiko tekanan inflasi beberapa gejolak harga diantaranya kenaikan LPG 3 kg, kenaikan TDL golongan rumah tangga dan TDL kelompok industri yang tentunya turut berimplikasi pada tekanan inflasi di DKI Jakarta disamping penyesuaian harga BBM yang berdampak pada biaya transportasi. Inflasi provinsi DKI Jakarta pada penetapan tahun 2015 diperkirakan lebih rendah dari realisasi tahun 2014, yaitu berada pada kisaran 5,0% - 6,0%. Penurunan inflasi Jakarta dikontribusikan oleh langkah - langkah guna menjamin ketahanan pangan dengan dukungan ketersediaan pasokan dan terjaganya ekspektasi.

Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah menjaga penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil bahan kebutuhan pokok untuk menjamin pasokan secara tepat waktu dengan mutu yang terjaga, pengurangan kemacetan untuk memperlancar distribusi bahan pokok, dan penciptaan lingkungan usaha yang tertib dan nyaman.

3.1.6. Nilai Tukar

Perekonomian global diperkirakan mengalami ketidakpastian yang dipicu oleh perlambatan di berbagai negara terutama Tiongkok,

melemahnya harga komoditas di pasar internasional, dan rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan DKI Jakarta. Tren penguatan dolar terhadap hampir seluruh mata uang dunia dipicu tren perekonomian AS yang tumbuh solid dengan perkiraan adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika *The Fed* yang turut membuat pelaku pasar terus berspekulasi terhadap imbas hasil dolar. Hal tersebut tercermin dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika tahun 2014 dengan nilai tengah mencapai Rp.12.440 per Dollar Amerika. Sedangkan hingga akhir bulan Maret tahun 2015, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika kembali melemah hingga kisaran Rp.12.803 – Rp.13.076 per Dollar Amerika. Selanjutnya Gambar 3.5 menjelaskan tentang fluktuasi nilai tukar tersebut.

Gambar 3.5 Perkembangan nilai tukar 2015

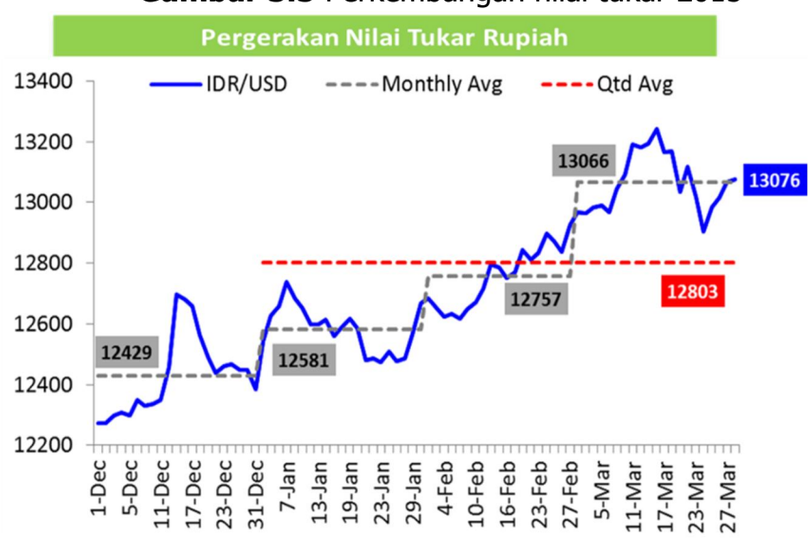

Sumber: Bank Indonesia

Memperhatikan kondisi tersebut dengan Nilai tukar Rupiah selama tahun 2015 Rupiah mengalami depresiasi terhadap mata uang dollar AS sebesar 4,96%, oleh karena itu Pemerintah segera melakukan koreksi angka nilai tukar rupiah terhadap dollar pada APBN-P 2015 menjadi sebesar Rp. 12.200 meskipun pada APBN 2015 proyeksi yang ditetapkan sebesar Rp. 11.900,-

3.1.7. Proyeksi Perekonomian Provinsi DKI Jakarta

Proyeksi perekonomian daerah tahun 2016 menjelaskan asumsi dasar ekonomi dan target ekonomi makro daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 yang memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, tingkat kesenjangan dan Indeks Pembangunan Manusia.

Penetapan asumsi dasar ekonomi DKI Jakarta tahun 2016 memasukkan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dengan mengikuti

asumsi yang digunakan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini karena nilai tukar bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinisi DKI Jakarta.

3.1.7.1. Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian Nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Perekonomian DKI Jakarta juga tergantung pada perkembangan perekonomian global. Berdasarkan kondisi riil perekonomian DKI Jakarta tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015, maka prospek perekonomian tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2015 diproyeksikan berada pada kisaran 5,9 - 6,3% (yoy) atau dapat dikatakan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut ditopang oleh prospek peningkatan investasi dengan adanya akselerasi proyek pembangunan infrastruktur, baik oleh swasta maupun pemerintah. Pengoperasian PTSP DKI Jakarta juga turut mendukung kinerja investasi yang lebih baik dengan adanya streamlining dari perizinan. Sementara itu, meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga terkait dengan pertumbuhan kelas menengah dan meningkatnya tingkat pendapatan, di tengah kondisi ekonomi makro yang stabil.

Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2016 diproyeksikan berada pada kisaran 6,2% - 6,6% (yoy). Semakin membaiknya perekonomian Jakarta pada tahun 2016 dipengaruhi oleh berlanjutnya perbaikan dari faktor eksternal (perekonomian global), serta semakin menguatnya kinerja perekonomian domestik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global akan mendukung perbaikan ekspor produk Jakarta baik ke pasar internasional maupun domestik, khususnya kinerja sektor industri manufaktur. Dukungan pertumbuhan juga bersumber dari meningkatnya kinerja investasi serta konsumsi rumah tangga. Namun, impor diprediksi juga turut meningkat terkait dengan masih besarnya ketergantungan pada bahan baku luar negeri dari industri manufaktur.

Gambar 3.6. Gambaran Menuju Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi 2016

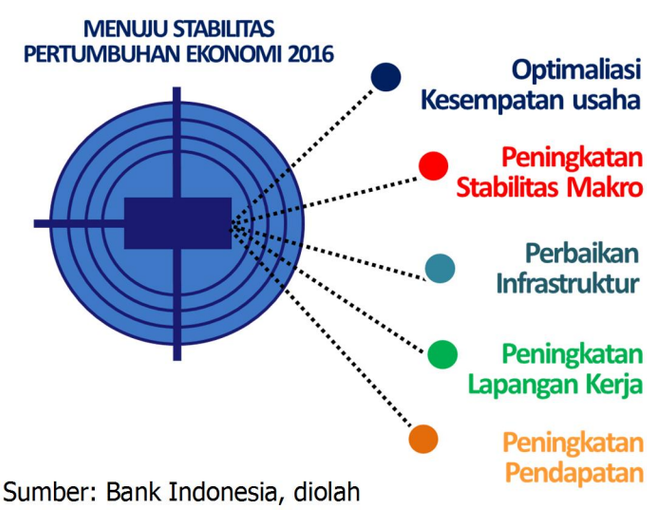

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2016 sebagaimana yang telah diproyeksikan, perlu mendapat didukung oleh sejumlah faktor penting dalam perekonomian, diantaranya dengan upaya:

1. Dukungan agar ekspor produk Jakarta dapat tumbuh hingga mencapai 6% (yoy). Peluang untuk mendorong pertumbuhan ekspor tersebut dilakukan dengan cara mengoptimalkan kesempatan yang terbuka dari kondisi membaiknya permintaan global dan domestik. Adapun kunci dari kompetisi dalam memperebutkan pasar ekspor adalah perbaikan daya saing serta diversifikasi produk manufaktur.
2. Faktor stabilitas makro dan perbaikan infrastruktur akan mendukung kinerja investasi dan aktivitas perdagangan. Semakin giatnya pembangunan infrastruktur dan pembenahan sistem logistik, serta mekanisme perizinan, akan memperbaiki iklim investasi yang akan mendukung pertumbuhan investasi.
3. Terjaganya stabilitas ekonomi makro akan mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan tingkat pendapatan, baik di sektor formal maupun informal. Lapangan kerja berkualitas tercipta dengan semakin berkembangnya bisnis di sektor jasa, yang diantaranya terkait dengan dimulainya penerapan pasar tunggal MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015.

3.1.7.2. Inflasi Jakarta

Inflasi DKI Jakarta pada tahun 2015 diproyeksikan berada pada kisaran 5,0–6,0 persen, lebih tinggi dari proyeksi inflasi nasional yang berada pada kisaran 4,4 persen. Proyeksi Inflasi DKI Jakarta pada tahun 2015 lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi tahun sebelumnya dikarenakan telah terlihatnya upaya untuk mengatasi defisit pangan sehubungan relatif kuatnya permintaan masyarakat urban, khususnya kelas menengah yang perlu ditopang dengan peningkatan pengawasan terhadap harga pokok juga karena terus dilakukan dengan meningkatkan peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna meminimalisir gejolak inflasi, disamping telah digalakannya program remunerasi Pegawai Kementerian/Lembaga dan Pemprov. DKI Jakarta berupa penyesuaian penghasilan.

Gambar 3.7. Gambaran Resiko Inflasi Jakarta Jangka Pendek tahun 2016

Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya tren penurunan tekanan inflasi akan terus berlanjut dimana untuk inflasi tahun 2016 diproyeksikan lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 4,1 – 4,5%. Kondisi tersebut terjadi dengan asumsi nilai tukar yang diharapkan mulai bergerak ke arah stabil dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga. Terkait dengan faktor risiko inflasi di Jakarta, sejumlah langkah strategis yang dapat diambil adalah:

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas program layanan publik yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat, sehingga tekanan upah dapat diminimalkan. Selain itu, dapat diberikan subsidi biaya transportasi, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dengan sistem insentif;
2. Pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka mengefisiensikan sistem logistik di Jakarta yang dapat menekan biaya produksi/distribusi barang serta jasa;
3. Pengarahan ekspektasi masyarakat melalui transparansi informasi harga;
4. Penguatan kerjasama daerah terutama melalui skema B-to-B (peran BUMD) untuk mendukung ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan.

3.1.7.3. Nilai Tukar

Selanjutnya, Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika pada tahun 2016 sebagaimana diproyeksikan pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2016 Kementerian Keuangan akan berada pada kisaran Rp. 12.800 – 13.200. Angka tersebut relatif lebih tinggi proyeksi pada APBN penetapan 2015 sebesar Rp.11.900.,- dan angka proyeksi pada APBN-Perubahan 2015 yang sebesar Rp.12.200.,-

Gambar 3.8. Gambaran Resiko Inflasi Jakarta Jangka Pendek tahun 2016

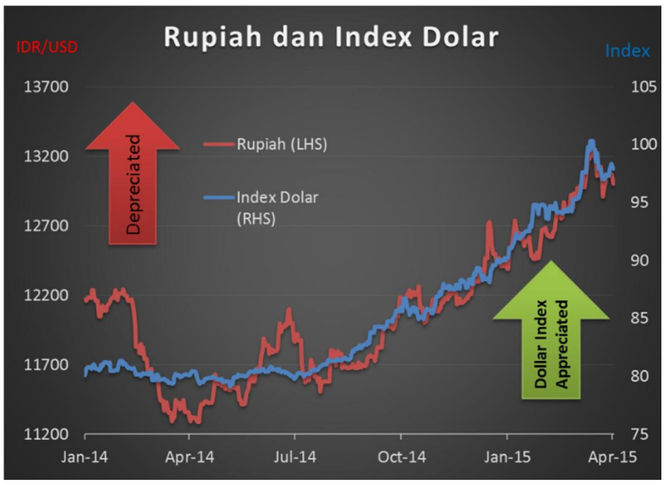

Sumber: Bloomberg dalam paparan BKF

Proyeksi nilai tukar rupiah pada tahun 2016 diperkirakan belum stabil meskipun masih terdapatnya peluang untuk semakin membaik. Kondisi ini didasari oleh ekspektasi semakin membaiknya neraca perdagangan Indonesia, masuknya arus modal, baik *Foreign Direct Investment* (FDI) maupun portofolio, serta semakin menguatnya sumber-sumber pembiayaan domestik yang seiring pelaksanaan kebijakan *financial inclusion* and *deepening*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka secara ringkas, ketiga indikator utama perekonomian daerah dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika

No.	VARIABEL		PENETAPAN 2015	PENETAPAN 2016
1.	**Pertumbuhan Ekonomi (%)**			
		DKI	**5,9 – 6,3**	**6,2 – 6,6***
		Nasional	**5,6**	**5,8 – 6,2****
2.	**Inflasi (%)**			
		DKI	**5,0 – 6,0**	**4,1 – 4,5***
		Nasional	**4,4**	**4,0±1,0****
3.	**Nilai tukar (Rupiah per Dollar Amerika)**			
		DKI/Nasional	**11.900**	**12.800-13.200***

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta
Sumber *: Proyeksi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2015
Sumber** : kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2016 Kementerian Keuangan, 2015

Pertumbuhan ekonomi tahun ini terjadi peningkatan dari 5,9 - 6,3 persen menjadi 6,2 - 6,6 persen, inflasi juga diprakirakan akan terjadi penurunan dari tahun 2015 sebesar 5,0 - 6,0 persen dan pada tahun 2016 menjadi 4,1 - 4,5 persen. Selanjutnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat melemah dari Rp. 11.900.-/per dolar

Amerika Serikat pada tahun 2015 menjadi Rp. 12.800 – 13.200.-/ per dolar Amerika Serikat pada tahun 2016.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2016 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan lain yang potensial untuk pendanaan pembangunan antara lain *Coorporate Social Responsibility* (CSR), dana swadaya masyarakat dan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan mengikat.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntubilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selanjutnya Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2013 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2014
(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	2013			2014*		
		Perubahan	Realisasi	%	Perubahan	Realisasi	%
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**26.304,09**	**26.852,19**	**102,08**	**39.757,30**	**31.277,25**	**78,67**
1.1	Pajak daerah	22,618,00	23,370,21	103,33	32.500,00	27.051,52	83,24
1.2	Retribusi daerah	500,58	333,78	66,68	1.746,41	514,86	29,48
1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	396,22	397,23	100,25	448,85	465,97	103,81
1.4	Lain-lain PAD yang sah	2,789,28	2,750,95	98,63	5.062,03	3.244,88	64,10
2.	**Dana Perimbangan**	**10,547,53**	**9,387,53**	**89.0**	**17.770,00**	**9.677,53**	**54,46**
2.1	Dana bagi hasil pajak	10,013,08	8,863,20	88,52	17.372,07	9.279,06	53,41
2.2	Dana bagi hasil bukan pajak	235,26	225,15	95,70	311,96	312,47	100,16
2.3	Dana alokasi umum	299,18	299,18	100,00	85,95	85,98	100,03
3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**3,948,23**	**3,277,81**	**83,02**	**7.514,79**	**2.493,06**	**33,18**
3.1	Hibah	1,760,52	1,148,32	65,23	5.000,00	10,13	0,20
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2,187,70	2,129,48	97,34	2.514,79	2.482,93	98,73
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**40.799,86**	**39.517,54**	**96,86**	**65.042,09**	**43.447,85**	**66,80**

Sumber: BPKAD Provinsi DKI Jakarta
*Sumber: BPKAD Provinsi DKI Jakarta (Unaudited)

Pendapatan Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp.39.517,54 Milyar, kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 40.799,86 Milyar atau realisasinya mencapai 96,86%. Sementara tahun 2014, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.43.447,85 Milyar, dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 65.042,09 Milyar atau realisasinya mencapai 66,80%. Secara total, Pendapatan Daerah tahun 2014 lebih tinggi 9,06% dibanding tahun 2013.

Tabel 3.14. Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2012-2014

URAIAN	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Rasio-rasio			
a. Rasio Pendapatan thd PDRB (%)	**2.81**	**2.59**	**2.61**
b. Rasio PAD thd PDRB (%)	1,63	1,77	1,87
c. Rasio Pajak Daerah thd PDRB (%)	**1,29**	**1,51**	**1,53**
d. Rasio Belanja thd PDRB (%)	2.38	2.55	2.24
e. Rasio Belanja Pegawai thd total belanja (%)	**34.33**	**30.51**	**32.54**

Sumber: BPS DKI Jakarta tahun 2014 Diolah dari Publikasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KER) Prov. DKI Jakarta Tr IV/2014, BI

Berdasarkan data pada Tabel 3.14, dapat dijelaskan bahwa Rasio Pajak menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggali penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Rasio belanja ini perlu mendapat perhatian, terutama yang menyangkut belanja modal dan belanja sosial. Kedua jenis belanja ini penting karena menunjukkan seberapa besar keberpihakkan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian DKI Jakarta bergerak lebih cepat. Selanjutnya untuk tahun 2015 dan 2016, Pendapatan Daerah direncanakan akan meningkat dengan rincian pada Tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15. Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2015-2016
(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		
		Penetapan Tahun 2015	Rencana Tahun 2016*	Proyeksi Tahun 2017**
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**40.355,85**	**44.336,32**	**48.361,95**
1.1.	Pajak daerah	36.079,10	37.000,00	40.100,00
1.2.	Retribusi daerah	600,00	800,00	960,00
1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	600,00	790,00	948,00
1.4.	Lain-lain PAD yang sah	3.076,75	5.776,32	6.353,95
2.	**Dana Perimbangan**	**12.760,46**	**15.500,50**	**17.825,00**
3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**7.326,41**	**5.019,81**	**4.274,77**
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**60.442,73**	**64.886,64**	**70.462,30**

Sumber: Pergub 160 Tahun 2015
*Sumber: BPKAD dan DPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2016
**Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 - 2017

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016, selain mengacu pada rencana pendapatan pada RAPBD Perubahan Tahun 2015 juga tergantung pada realisasi pendapatan daerah pada Penetapan APBD Tahun 2015. Selain itu, melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta serta dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun, diharapkan Pendapatan Daerah

mengalami peningkatan, dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah dengan pendapatan terbesar diperoleh dari Pajak Daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2014 dan APBD tahun 2015, rencana pendapatan daerah tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp. 64,88 Triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp.44,33 Triliun, Dana Perimbangan Rp.15,50 Triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 5,01 Triliun. Angka Pendapatan Daerah akan mengalami kenaikan terhadap penetapan 2015 menjadi sebesar Rp. 63.88 Triliun.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(1) Pajak Daerah

a) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

- Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
- Melakukan penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan *drive thru* dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.

b) Peningkatan *Law Enforcement*

- Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- Meningkatkan kerjasama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

c) Intensifikasi Pajak Daerah

- Optimalisasi online sistem terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi.
- Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
- Memberlakukan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- Melakukan kerjasama dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan data kuota BBM para perusahaan penyalur BBM dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-KB.
- Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dalam rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan pajak rokok
- Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Stakeholder yang terkait dengan penentuan potensi pajak daerah
- Membangun sistem terintegrasi antara Pemprov DKI, BPN, PPAT, dan Bank dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online
- Meningkatkan kerja sama dengan DJP dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait perpajakan
- Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah

d) Ekstensifikasi Pajak Daerah

- Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah, seperti :
  1. Perubahan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan pertama (BBN I) yang sebelumnya 10% menjadi 15%
  2. Perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, yang sebelumnya 2,4% menjadi 6% untuk masyarakat pelanggan diatas 3.500 kva.
  3. Perubahan tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20% menjadi 30%.
- Melakukan perluasan basis Pajak Daerah
  1. Pengenaan persewaan seluruh ruangan hotel sebagai objek pajak hotel
  2. Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan
  3. Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan BUMD menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan.
  4. Menyesuaikan tarif Kelas Jalan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame
  5. Optimalisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong pengalihan penyelenggaraan jenis reklame papan menjadi jenis reklame LED
  6. Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengalihan on-street parking menjadi off-street parking dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Parkir
  7. Pengenaan PPJB sebagai objek BPHTB dan mendorong pengelola apartemen untuk percepatan perubahan PPJB menjadi AJB sebagai objek BPHTB
  8. Penyesuaian NJOP PBB pada zona komersial mendekati harga pasar
  9. Pengenaan pajak restoran terhadap jenis usaha restoran dengan peredaran usaha diatas Rp. 200 juta/tahun.

(2) Retribusi Daerah

a) Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah

- Penerapan *e*-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah.
- Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi.
- Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

b) Peningkatan *Law Enforcement*

- Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

- Membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank dalam rangka pembayaran rertribusi Daerah.

c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah

- Melakukan penyesuaian tariff beberapa jenis retribusi Daerah.
- Melakukan pembaharuan system pelayanan dan pembayaran Retribusi UKM.

3.2.2.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;

(2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

(3) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, Penerbitan Obligasi*, Initial Public Offering* (IPO), dll.

(4) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;

(5) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

(6) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management.*

3.2.2.3. Kebijakan Dana Perimbangan

Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam), serta perolehan DAU.

3.2.2.4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT sesuai perjanjian perubahan (amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), Hibah PT. Jasa Raharja (Persero), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

3.2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

(1) Pemberlakuan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor baru sebesar 15 persen.

(2) Perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, yang sebelumnya 2,4persen menjadi 6 persen untuk masyarakat pelanggan diatas 3.500 kva.

(3) Perubahan tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen.

(4) Meningkatkan Tarif Pajak Hiburan terhadap jenis hiburan tertentu sebesar 35 persen untuk jenis hiburan malam dan sejenisnya, sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 75 persen untuk jenis hiburan tertentu.

(5) Melakukan pemungutan pajak daerah dengan peningkatan online sistem wajib pajak bekerjasama dengan bank BRI dengan mengimplementasikan Cash Management System (CMS) terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan.

(6) Melakukan optimalisasi penerimaan pajak reklame dengan pemberlakuan perubahan dasar pengenaan pajak reklame untuk reklame berjalan dan menyesuaikan tarif Kelas Jalan.

(7) Menerapkan penyelenggaraan reklame dengan teknologi LED, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak reklame dan menata ruang kota Jakarta menjadi lebih indah dalam penempatan reklame.

(8) Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengalihan on-street parking menjadi off-street parking dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Parkir

(9) Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB.

(10) Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 serta melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

(11) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melaui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.

(12) Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan

(13) Meningkatkan kerja sama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2016 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 yaitu sebagai berikut:

3.2.3.1. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib :

(1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

(2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

3.2.3.2. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD :

(1) Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

(2) Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2016 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun keempat yang tertuang di dalam RPJMD yaitu memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan kota Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi.

(3) Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.

(4) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.

(5) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.

(6) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.

(7) Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang diparipurnakan kemudian dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur pada pasal 96 ayat Perda 14 tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

(8) Meningkatkan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara sebagaimana yang diamanatkan pada arah kebijakan pembangunan RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 – 2017.

3.2.3.3. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014):

(1) Pendidikan
(2) Kesehatan
(3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
(4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
(5) Ketenteraman
(6) Ketertiban umum
(7) Pelindungan masyarakat social

3.2.3.4. Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) :

(1) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
(2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan belanja daerah, dapat dilihat pada ringkasan rencana dan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2012 - 2014 berikut:

Tabel 3.16. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 - 2014
(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	2012		2013		2014	
		Penetapan	Realisasi	Penetapan	Realisasi	Penetapan	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	12.552,58	11.673,11	14.968,96	13.148,60	17.125,17	12.634,34
a.	Belanja Pegawai	10.286,14	9.688,17	11.140,29	10.046,18	13.078,48	10.472,32
b.	Belanja Bunga	4,35	3,17	4,35	2,19	4,35	1,21
c.	Belanja Hibah	2.089,28	1.933,09	2.231,65	1.999,96	2.714,82	1.462,46
d.	Belanja Bantuan Sosial	29,47	15,99	1.277,39	1.044,59	1.220,97	682,20
e.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	46,35	30,18	61,49	44,28	37,30	14,00
f.	Belanja Tidak Terduga	96,98	2,48	253,77	11,37	69,22	2,13
2.	Belanja Langsung	25.814,09	19.885,57	31.609,90	25.152,90	46.524,93	25.125,42
a.	Belanja Pegawai	1.610,69	1.397,77	2.119,47	1.815,48	2.897,84	2.132,26
b.	Belanja Barang dan Jasa	11.383,66	9.703,43	14.610,82	12.641,39	18.096,45	12.582,04
c.	Belanja Modal	12.819,72	8.784,36	14.879,60	10.696,01	25.530,63	10.411,11
JUMLAH BELANJA DAERAH		**38.366,68**	**31.558,68**	**46.578,86**	**38.301,50**	**63.650,10**	**37.759,77**

Sumber: BPKAD Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2015, untuk memenuhi tuntutan penyelesaian permasalahan provinsi di DKI Jakarta serta dalam rangka memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, belanja Daerah direncanakan meningkat. Pada tahun 2016 belanja Daerah yang direncanakan juga mengalami peningkatan. Adapun rincian sebagai tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17. Rencana Belanja Daerah Tahun 2014-2016
(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		
		Penetapan Tahun 2015	Rencana Tahun 2016*	Proyeksi 2017**
1.	Belanja Tidak Langsung	24.760.91	25.795,01	28.164,26
a.	Belanja Pegawai	19.311,40	19.386,98	
b.	Belanja Bunga	46,07	30,00	
c.	Belanja Subsidi	940,00	1.687,03	
d.	Belanja Hibah	1.681,89	1.996,70	
e.	Belanja Bantuan Sosial	2.312,85	2.524,44	
f.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	401,17	-	
g.	Belanja Tidak Terduga	67,50	169,86	
2.	Belanja Langsung	38.889,19	40.002,36	42.053,55
JUMLAH BELANJA DAERAH		**63.650,10**	**65.797,38**	**70.217,82**

Sumber: Pergub 160 Tahun 2015
*Sumber: BPKAD dan DPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015
**Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 – 2017

Tahun 2016, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.65,79 Triliun, Rp.40.00 Triliun untuk Belanja Langsung dan Rp.25.79 Triliun untuk Belanja Tidak Langsung.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.2.4.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Untuk SiLPA Tahun 2015 diperkirakan akan mencapai Rp.7.933.425.813.490, sementara untuk Penerimaan berupa Pinjaman Daerah sebesar Rp.229.931.508.600.

3.2.4.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah (PMD) pada BUMD/PT Patungan. Kebijakan pemberian PMD pada BUMD/PT Patungan tersebut dengan memprioritaskan kegiatan peningkatan transportasi massal di DKI Jakarta sebagai salah satu upaya penanggulangan kemacetan seperti PMD pada PT. MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta, seperti memprioritaskan PMD pada PT Bank DKI yang merupakan BUMD yang memberikan deviden terbesar kepada Pemprov. DKI Jakarta. Untuk memberikan gambaran pembiayaan daerah, berikut dijabarkan pada Tabel 3.18 berikut realisasi pembiayaan daerah tahun 2012, 2013 dan 2014.

Tabel 3.18. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2014
(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	2012			2013			2014*		
		Perubahan	Realisasi	%	Perubahan	Realisasi	%	Perubahan	Realisasi	%
1.	**Sumber Penerimaan Daerah**	**7.703,21**	**6.475,55**	**84,06**	9.463,72	9.463,72	100%	7.863,39	7.593,99	96,57
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	6.470,61	6.470,61	100,00	9.463,72	9.463,72	100%	7.593,99	7.593,99	100,00
1.2	Transfer dari Dana Cadangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	2012			2013			2014*		
		Perubahan	Realisasi	%	Perubahan	Realisasi	%	Perubahan	Realisasi	%
	Daerah yang Dipisahkan									
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00
2.	**Sumber Pengeluaran Daerah**	**2.986,55**	**832,30**	**27,87**	**3.684,72**	**3.085,76**	**83,74**	**9.255,38**	**4.119,59**	**44,51**
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	49,06	0,00	0	54,03	0,00	0,00	73,10	0,00
2.2	Penyertaan Modal Pemerintah	2.781,68	618,47	22,23	3.626,52	2.981,40	82,21%	9.246,00	4.033,50	43,62
2.3	Pembayaran Utang Pokok	11,22	8,16	72,75	10,97	8,16	74,43%	9,38	8,16	87,02
2.4	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	35,04	34,65	98,88	47,21	39,75	84,21%			
2.5	Pembayaran Utang TPP	105,20	57,50	54,66						
2.6	Pemberian Pinjaman Daerah	53,40	55,44	103,82	0	2,4	0,00	0,00	4,81	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**4.716,66**	**5.643,24**	**119,64**	**5,779,00**	**6.377,95**	**110,36%**	**1.391,99**	**3.474,40**	**249,59**

Sumber: BPKAD Provinsi DKI Jakarta
*Sumber: BPKAD Provinsi DKI Jakarta (Unaudited)

Rencana pembiayaan daerah memegang pereanan penting dalam penyusunan APBD di DKI Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja. Selanjutnya untuk rencana pembiayaan daerah tahun 2016 serta tren perkembangannya dijabarkan pada Tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.19. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2016
(dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		
		Penetapan Tahun 2015	**Rencana Tahun 2016***	**Proyeksi 2017****
1.	Sumber Penerimaan Daerah	8.843,68	8.163,35	5.796,02
2.	Sumber Pengeluaran Daerah	5.636,31	7.252,61	6.040,51
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**3.207,36**	**910,73**	**- 244,48**

Sumber: Pergub 160 Tahun 2015
*Sumber: BPKAD dan DPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015
**Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 – 2017

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, dan dari penerimaan serta Pinjaman Daerah. Sedang dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk kegiatan Pembiayaan *Mass Rapid Transit (MRT)* melalui skema Penyertaan Modal Daerah (PMD).